

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN 2023

JL. Palapa Nomor 11 Kupang 85111
Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id,
posaduan.diskominfo@nttprov.go.id
Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id,
www.ppidutama.nttprov.go.id

Lembar Verifikasi Level 1 LKIP 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Fungsional Perencana Muda 30/01/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi data realisasi dan data dukung 2. Verifikasi nilai capaian, realisasi target kinerja, belanja dan pendapatan
2	Sekretaris 31/01/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi Bab I, masukan pada pendahuluan ditambah dasar hukum penyusunan LAKIP 2. Dikoreksi data sarana Parasarana terutama kondisinya.

Kupang, 31 Januari 2024,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo	
Perencana Ahli Muda	
Analisis Data dan Informasi	

EKSEKUTIF SUMMARY

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di bangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisi informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2022 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Bertolak dari kondisi faktual bahwa komunikasi dan informatika serta pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan sesuai pula dengan Visi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah “Nusa Tenggara Timur Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan pada Misi ke V yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suatu Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, melaksanakan program-program komunikasi dan informatika yang tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah “Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan Kepada Daerah”.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai Sasaran-Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik;
3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah;
4. Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi;
5. Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2023 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang Tahun 2023.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini disusun berdasarkan komitmen dan motivasi semua unit kerja, pimpinan dan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan perjanjian kinerja secara konsisten serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, 31 Januari 2024,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo	
Perencana Ahli Muda	
Analisis Data dan Informasi	

DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Maksud dan Tujuan	2
C.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo	2
D.	Permasalahan dan Isu-isu Strategis	10
E.	Sistematika Penulisan LKIP	13
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA	15
A.	Rencana Strategi Organisasi	15
1.	Visi	15
2.	Misi	15
3.	Tujuan dan Sasaran	15
B.	Rencana Kerja (RKT) Tahun 2023	17
C.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	18
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	20
A.	Capaian Kinerja Organisasi	20
1.	Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas	21
2.	Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD	22
3.	Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional	23
4.	Analisis Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas	24
5.	Permasalahan dan Solusi	32
6.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja	40
B.	Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran	49
1.	Pendapatan	49
2.	Belanja	50
BAB. IV	PENUTUP	62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran – saran	62

DAFTAR TABEL

1	Tabel Jumlah Asset Dinas Kominfo	8
2	Tabel Jumlah Perangkat Keras Komputer Dinas Kominfo	9
3	Tabel Jumlah Sarana Pendukung Dinas Kominfo	9
4	Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo	10
5	Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo	16
6	Tabel RKT Dinas Kominfo Tahun 2023	17
7	Tabel PK Dinas Kominfo Tahun 2023	18
8	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas Kominfo	21
9	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD	22
10	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional	23
11	Tabel Layanan Internet dan Jaringan Intranet Dinas Kominfo	29
12	Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
13	Tabel Analisis Program/Kegiatan dan Anggaran Pencapaian Perjanjian Kinerja	40
14	Tabel Realisasi Pendapatan	49
15	Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja	50
16	Tabel Realisasi Belanja Program/Kegiatan	52

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	4
2	Gambar Komposisi Status Kepegawaian	4
3	Gambar Komposisi Jabatan PNS	5
4	Gambar Komposisi Jabatan Struktural PNS	5
5	Gambar Komposisi PNS sesuai Pangkat dan Golongan	6
6	Gambar Komposisi PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan	6
7	Gambar Komposisi Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan	7
8	Gambar Komposisi PNS menurut Gender	7
9	Gambar Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu	8
10	Gambar Target dan Realisasi Jenis PAD Dinas Kominfo	49
11	Gambar Target dan Realisasi Jenis Belanja Dinas Kominfo	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB). Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, implementasi SAKIP sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi Pemerintah di lingkungannya setiap tahun dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisi informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2023 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyampaikan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur) Tahun Anggaran 2023;
2. Deskripsi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
3. Umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan ;
4. Sebagai penilaian terhadap Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang tertuang dalam RENSTRA sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai **Tugas** sebagai berikut:

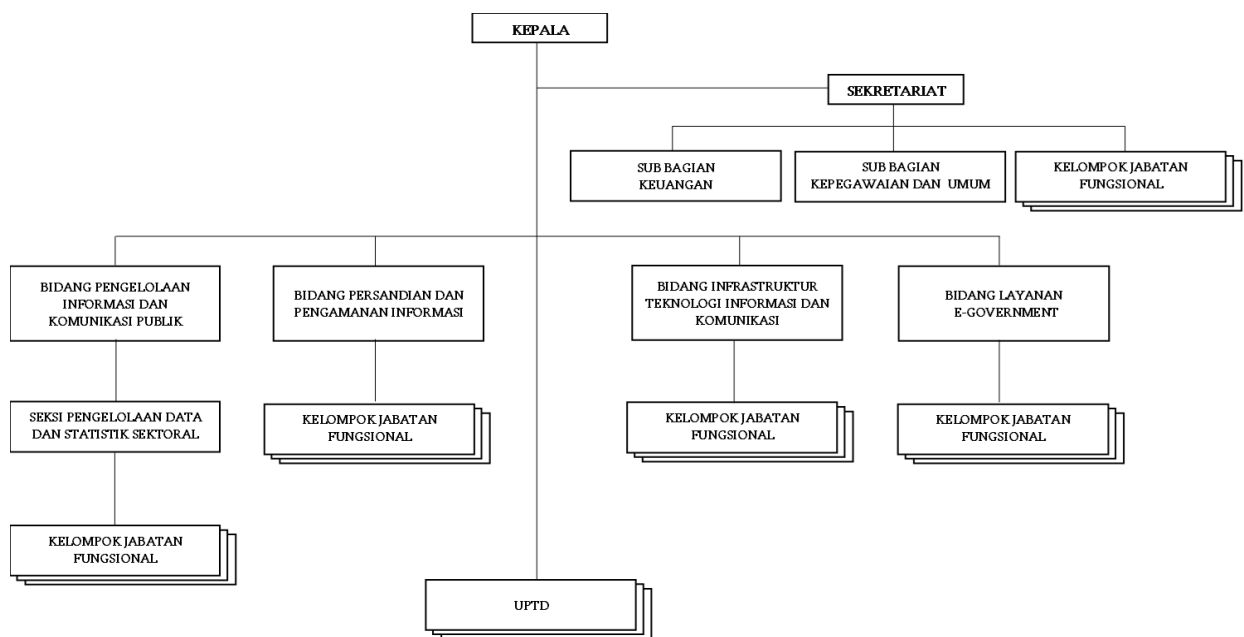
“Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah”.

Dalam melaksanakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan **Fungsi** sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon II), 1 (satu) orang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), 3 (tiga) orang Sub Bagian/Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut:

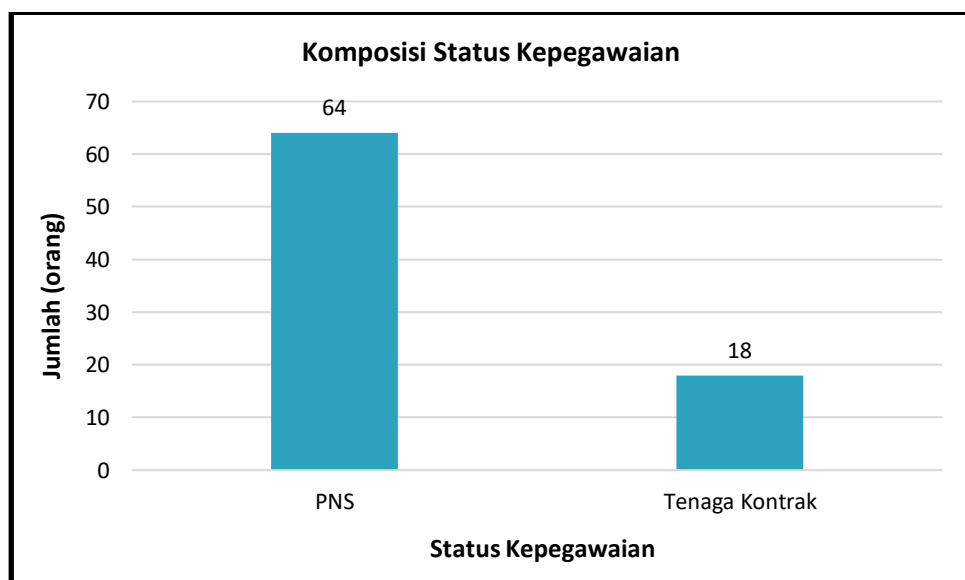


Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Kepegawaian

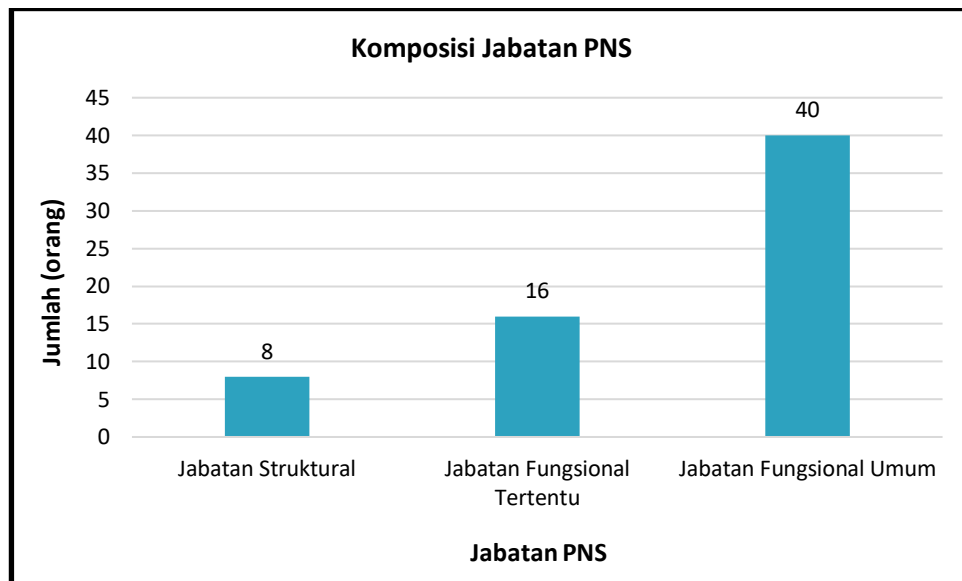
Jumlah ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 sebanyak 82 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian



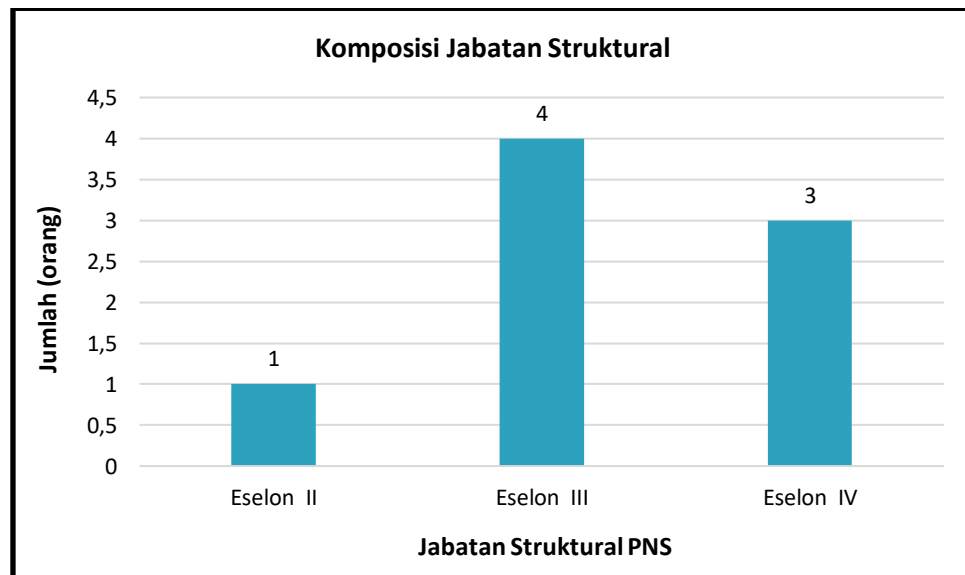
Gambar. 2
Komposisi Status Kepegawaian

b. Komposisi Jabatan PNS



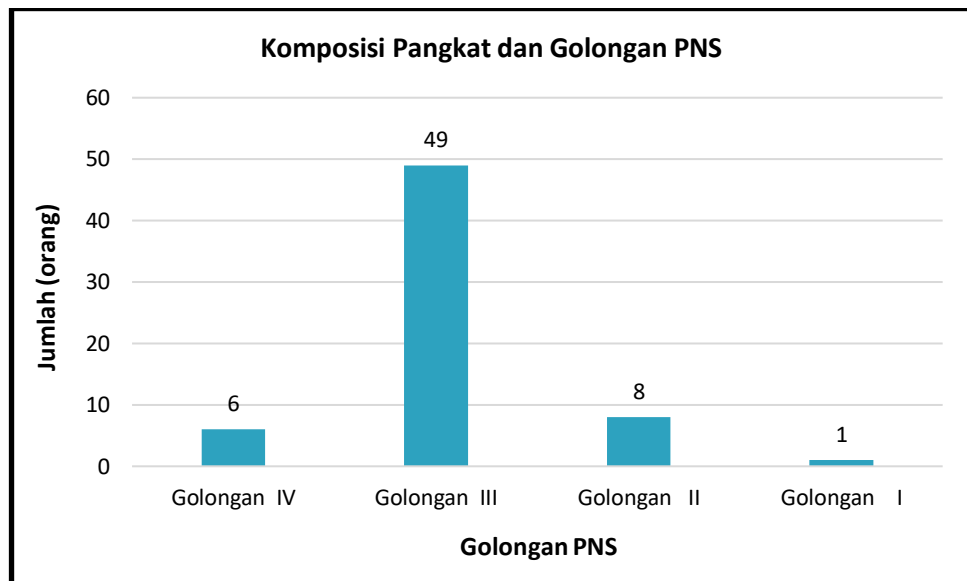
Gambar. 3
Komposisi Jabatan PNS

c. Komposisi Jabatan Struktural PNS



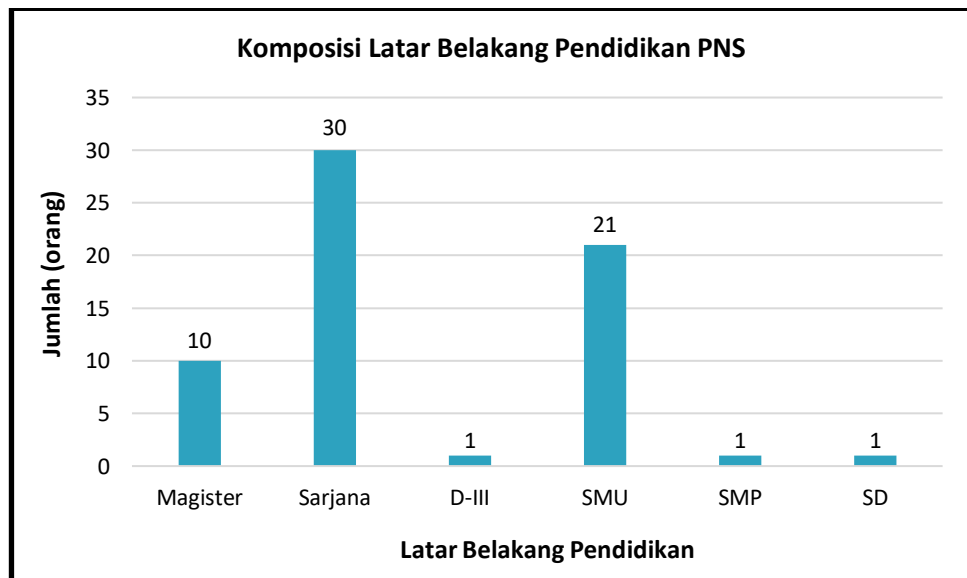
Gambar. 4
Komposisi Jabatan Struktural PNS

d. Komposisi PNS sesuai Pangkat dan Golongan



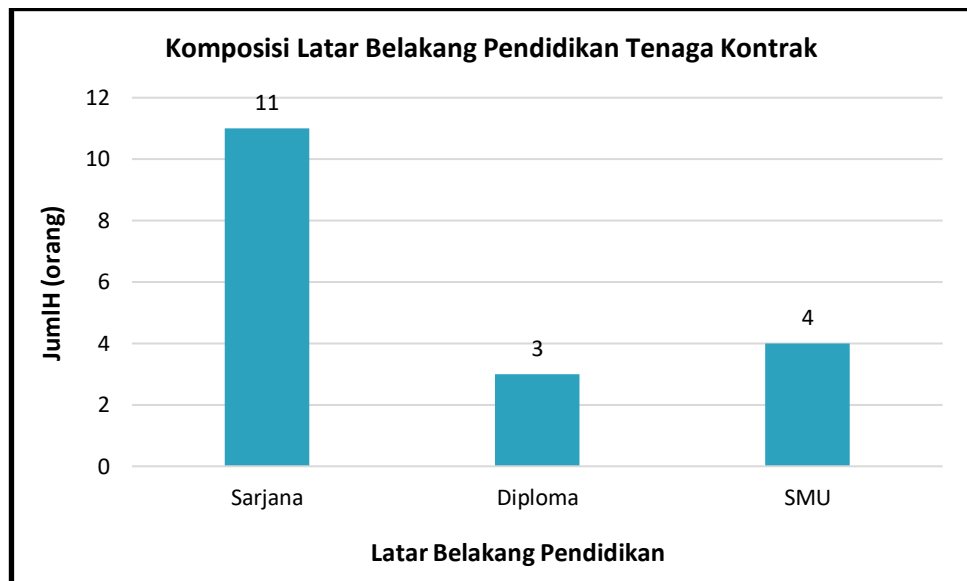
Gambar. 5
PNS sesuai Pangkat dan Golongan

e. Komposisi PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan



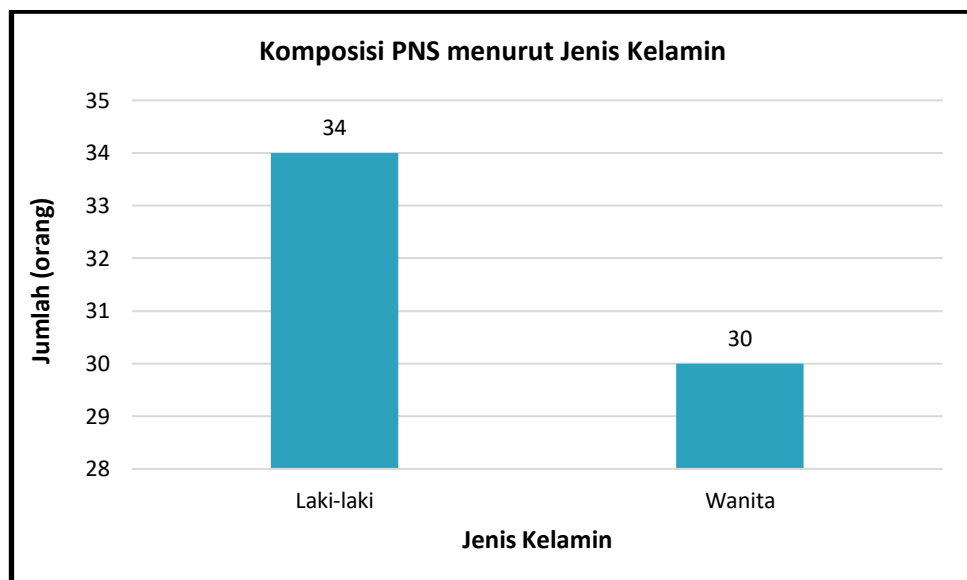
Gambar. 6
PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan

- f. Komposisi Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan



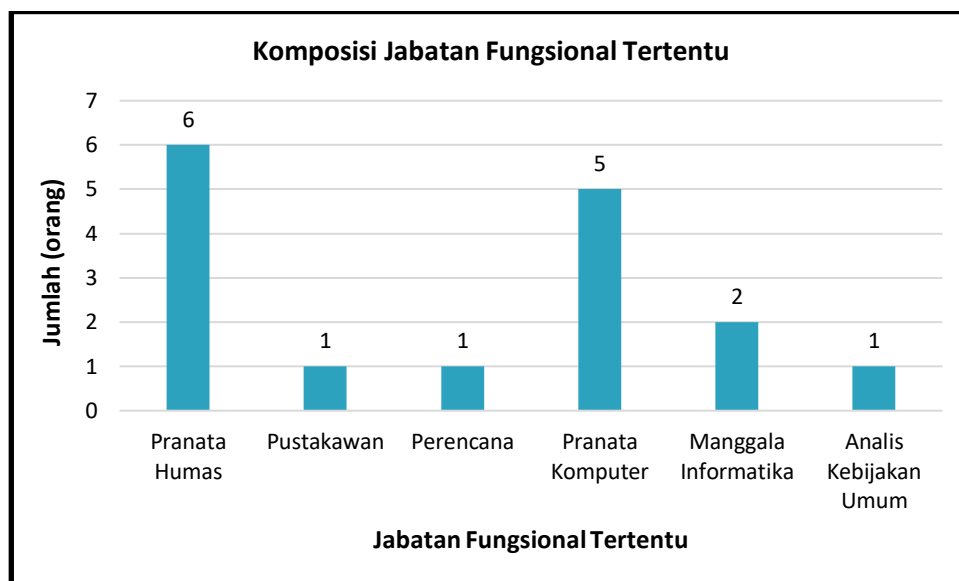
Gambar. 7
Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan

- g. Komposisi PNS menurut Gender



Gambar. 8
PNS Menurut Gender

h. Jenis Pejabat Fungsional Tertentu



Gambar. 9
Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu

4. Keadaan sarana prasarana

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasarana perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.

Tabel. 1
Jumlah Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	4	Bidang	Sertifikat disimpan di BPAD
2	Alat-alat angkutan	6	Unit	Dalam kondisi baik
3	Bangunan gedung	4	Gedung	Gedung Kantor
4	Gedung Aula	1	Gedung	Ruang Rapat Objek PAD
5	Peralatan dan Mesin	1	Paket	

Tabel. 2
Jumlah Perangkat Keras TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Server	10	Unit	Baik
2	PC/Komputer	35	Unit	Baik
3	Laptop	18	Unit	Baik
4	Printer	17	Unit	Baik

Tabel. 3
Jumlah Sarana Pendukung TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	LCD	3	Unit	Baik
2	Kamera	2	Unit	Baik
3	Kamera Shoting	1	Unit	Baik
4	Web Camera	3	Unit	Baik
5	Kamera Drone	1	Unit	Baik
6	Handycam	1	Unit	Baik
7	Tripod	1	Unit	Baik
8	Monopod	1	Unit	Baik
9	Televisi	3	Unit	Baik
10	Scanner	2	Unit	Baik
11	Flash Kamera	1	Unit	Baik
12	Lensa Tele Tambahan	1	Unit	Baik
13	RAM Server	3	Unit	Baik
14	Resiver CCTV	1	Unit	Baik
15	Mesin Sidik Jari	2	Unit	Baik
16	Harddisk Eksternal	5	Unit	Baik
17	UPS	19	Unit	Baik
18	Mixer	1	Unit	Baik
19	Genset	1	Unit	Baik

Demikian gambaran eksisting dukungan infrastruktur TIK, SDM dan prasarana pendukung lainnya sampai dengan kondisi tahun 2023.

D. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

Tabel. 4
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE Lingkup Pemerintah Provinsi	1. Membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK yang belum didukung dengan jaringan LAN serta Fiber Optik (FO).	1. Masing-masing Perangkat Daerah masih mengembangkan aplikasi secara parsial dan tidak terintegrasi. 2. Pembangunan aplikasi dan TIK belum memenuhi standarisasi TIK
		2. Aplikasi e-Government (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan belum terintegrasi.	1. Belum tersedianya Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai kerangka acuan dalam pengelolaan SPBE
		3. Pelaksanaan Keamanan Informasi belum memadai.	1. Keamanan aplikasi: untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan sistem aplikasi yang dikembangkan. 2. Keamanan jaringan: dalam jaringan computer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak. 3. Keamanan Lingkungan: kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki keamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan server, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		4. Terbatasnya SDM pengelola TIK.	1. Terbatasnya jumlah SDM TIK. 2. Terbatasnya kapasitas SDM TIK yang tersedia. 3. Kurangnya pengembangan kompetensi SDM TIK.
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1. Pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik belum dilaksanakan berbasis TIK.	1. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah untuk menyiapkan informasi publik baik berupa profil Perangkat Daerah, program, dan kegiatan serta capaian kinerja belum optimal mempublikasikan. 2. Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal.
3.	Belum optimalnya Pengelolaan Satu Data NTT	1. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral	1. Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan aplikasi di Perangkat Daerah yang bermacam-macam platform. 2. Data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah bersifat terpisah sehingga terjadi duplikasi dan perbedaan. 3. Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah

2. Isu-isu Strategis

a) Pembangunan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi NTT;

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dikelola sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

b) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Provinsi NTT akan dilayani berbasis elektronik. Layanan masyarakat yang semula secara manual secara bertahap akan dilayani secara elektronik. Implementasi e-Government perlu didorong terus agar semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumber daya manusia.

c) Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi;

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Hal ini selaras dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruh badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara serta merta, setiap saat dan berkala kepada masyarakat.

d) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa ekses yang kurang baik bagi masyarakat.

e) Keamanan Informasi SPBE;

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat :

- Pembangunan dan pengembangan TIK pada Perangkat Daerah belum berbasis keamanan informasi.
- Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;

Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

- Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
- Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
- Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

f) Peningkatan Infrastruktur TIK dan Pengintegrasian Data di Seluruh OPD.

Perkembangan di bidang TIK yang semakin maju, dan kebutuhan data dan informasi PD dilingkungan Pemerintah Provinsi NTT memerlukan sarana prasarana yang lebih efisiensi dan dijamin keamanannya (*security*) guna melakukan penyimpanan yang aman dari segala gangguan dalam lalu lintas data. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, hampir semua PD telah memiliki dukungan jaringan TIK guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari, meski demikian, inisiatif keberadaan fasilitas infrastruktur tersebut tidak serupa karena masing-masing instansi memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam mengembangkan sistem TIK-nya. Hal ini telah menyebabkan beberapa permasalahan antara lain :

- Pengembangan infrastruktur khususnya untuk sistem jaringan yang belum berbasis LAN dan FO kurang memperhatikan efektivitas dan efisiensi yang berskala nasional.
- Standar konfigurasi sistem jaringan di PD yang aman belum ada, sehingga masing-masing PD menyelenggarakan sistem jaringan TIK nya sendiri.

E. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas Komunikasi dan Informatika Provisi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

❖ BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
- D. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
- E. Sistematika Penulisan LKIP

❖ BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategi Organisasi
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan dan Sasaran
- B. Rencana Kerja Tahun (RKT) Tahun 2023
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

❖ BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas
2. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD
3. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional
4. Analisis Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas
5. Permasalahan dan Solusi
6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

B. Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran

1. Pendapatan
2. Belanja

❖ BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran – saran

❖ Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI

1. VISI :

Visi merupakan pedoman bagi upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bagi sebuah organisasi, karena itu Pemerintah Daerah Provinsi NTT menetapkan Visi sebagai berikut :

**“Nusa Tenggara Timur Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia”**

2. MISI :

Untuk menjabarkan visi tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan 5 Misi sebagai langkah konkretisasi terhadap Visi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam melaksanakan program dan kegiatan secara fokus menjabarkan Misi yang ke-5 yaitu:

**“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik”**

3. TUJUAN DAN SASARAN :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT:

a) Tujuan

- Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* (SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan RPJMD dan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, kualitas layanan publik, mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

b) Sasaran

- Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
- Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
- Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif.

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik dalam mewujudkan peningkatan keterbukaan informasi publik.
- Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web.
- Meningkatnya penyebaran informasi publik.
- Tersedianya data statistik sektoral oleh Perangkat Daerah dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah.
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika.
- Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK.
- Tersedianya kapasitas SDM SPBE yang profesional.

Tabel. 5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan manajemen pemerintahan yang transparan, obyektif, akuntabel dan efisien berbasis TIK untuk memperlancar transaksi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan;	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	45	50	80	85	90
		Jumlah PD yang memiliki website untuk Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD
	Meningkatnya layanan SPBE yang terintegrasi dan berorientasi kepada pengguna (layanan aplikasi)	Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi Skor/Level	0	52,48	61	76	90
	Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Terbangunnya jaringan LAN, Jaringan Intranet dan Jaringan Internet terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT melalui Network Operation Center (NOC)	25%	30%	35%	75%	100%
	Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Keamanan Informasi Skor / Level	0	52,48	61/ 3-3,9	76/ 4-4,9	90/ 5
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Ketersediaan Data Statistik Sektoral dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur pengembangan ekonomi masyarakat oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

B. RENCANA KERJA (RKT) TAHUN 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung terhadap arah kebijakan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik sebagaimana yang digariskan dalam RPJMD 2018 - 2023, dan merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel. 6

RENCANA KINERJA TAHUN 2023 (RKT 2023) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET
			2022	2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	3,35 Index point	2,7 Index point
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	76,99 Skor	77 Skor
		Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	77,479 Skor	79,078 Skor
		Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi.	100 %	

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Berdasarkan RPJMD, RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, sebagai berikut :

Tabel. 7

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PK 2023) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	3,35 Index point	2,7 Index point	$\frac{\text{Nilai indeks SPBE yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai indeks SPBE hasil evaluasi KemenpanRB pada tahun berjalan}} \times 100$
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	76,99 Skor	77 Skor	$\frac{\text{Nilai tingkat keterbukaan informasi publik yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai tingkat keterbukaan informasi publik hasil evaluasi KI Pusat pada tahun berjalan}} \times 100$
		Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	77,479 Skor	79,078 Skor	$\frac{\text{Nilai tingkat pengamanan informasi daerah yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai tingkat pengamanan informasi daerah hasil evaluasi BSSN pada tahun berjalan}} \times 100$
		Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi.	100 %	100 %	$\frac{\text{Persentase layanan distribusi Intranet terintegrasi di PD yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Persentase layanan distribusi intranet terintegrasi di PD yang terealisasi pada tahun berjalan}} \times 100$

B. Pelaksanaan Anggaran

	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (program)	Rp. 13.590.100.235,-	Realisasi minimal 85 %
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.335.135.315,-	Realisasi minimal 90 %
	2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1,118.734.200,-	Realisasi minimal 85 %
	3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 5.100.090.720,-	Realisasi minimal 85 %
	4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 36.140.000,-	Realisasi minimal 85 %
	b) Pendapatan	Rp. 60.000.000,-	Realisasi minimal 90 %
2)	APBN		
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)	Rp. -	
	1. -	Rp. -	
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -	Realisasi minimal 90 %

- C. Menggunakan Aplikasi e-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);
- F. Rata-rata Realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;
- G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:
 - 1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80 %
 - 2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80 %
- H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah minimal 2 (dua) jenis;
- I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;
- J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);
- L. Jumlah PKS dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diatur tentang penyelenggaraan SAKIP yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan serta reviu dan evaluasi kinerja yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu.

Oleh karena itu semua instansi Pemerintah tak terkecuali Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya berkewajiban untuk melakukan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan meliputi keberhasilan dan juga kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo sebagai berikut:

1. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik;
3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah;
4. Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.

Terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas

Tabel. 8
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas

No	IKU/Sasaran Strategis	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT .	Indeks	2,7	3,83	100
2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	Skor	77	77,06	100
3	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	Skor	79,078	79,078	100
4	Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.	%	100	100	100
Rata-rata					100

A.2. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD-P 2018 -2023

Tabel. 9
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas Tahun 2019 s/d 2023

IKU/Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	2019			2020			2021			2022			2023		
	2018	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1,26 Skor	2,1 Indeks	2,24 Indeks	100%	2,1 Indeks	3,6 Indeks	100%	2,3 Indeks	2,28 Indeks	99,13%	2,5 Indeks	3,35 Indeks	100%	2,7 Indeks	3,83 Indeks	100%
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	42,23 Skor	45 Skor	45 Skor	100%	59,65 Skor	59,65 Skor	100%	80 Skor	88,38 Skor	100%	85 Skor	76,99 Skor	90,58%	77 Nilai	77,06 Nilai	100%
Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	-	-	-	-	52,48 Skor	52,48 Skor	100%	61 Skor	68,01 Skor	100%	76 Skor	77,479 Skor	100%	79,078 Skor	79,078 Skor	100%
Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	45%	79,49 %	100%	75%	100%	100%	-	-	-
Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi	0	35%	35%	100%	50%	17,95%	35,90%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A.3. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional

Tabel. 10
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional

No.	Indikator	Realisasi 2023	Sumber Data	IKU/Sasaran Strategis Diskominfo	Realisasi 2023	Sumber Data
1.	Indeks SPBE Nasional	2,79	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	3,83	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
	Indeks SPBE Kementerian Kominfo	4,52				
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional	75,40	Hasil penilaian Komisi Informasi Pusat RI	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	77,06	Hasil penilaian Komisi Informasi Pusat RI
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Kominfo	96,09				
3.	Global Cybersecurity Index (Indeks Keamanan Siber Global)	94,88	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	79,078	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

A.4. Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertindak sebagai *leading sector* dalam implementasi dan pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkup Provinsi NTT telah mengikuti pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 yang diselenggarakan oleh KemenpanRB.

Evaluasi/penilaian bertujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan SPBE pada setiap instansi pemerintah. Upaya peningkatan penerapan SPBE tidak sekadar dengan melakukan penilaian melainkan mendorong pengintegrasian dan keterpaduan dalam menerapkan SPBE itu sendiri. Dalam aspek layanan, diharapkan SPBE akan mempunyai satu *interoperability* dalam pelaksanaan aplikasi-aplikasi di seluruh Perangkat Daerah. Penilaian penerapan SPBE ini didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 tergambar dari tercapainya indeks SPBE berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat nilai indeks sebesar 3,83 naik 1,13 poin dari target yang diperjanjikan. Jika disandingkan dengan realisasi tahun 2022, nilai indeks mengalami kenaikan sebesar 0,48 poin atau peningkatan sebesar 14,33 %. Maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh :

- a) Kerja Kolaboratif masing-masing semua Sumber Daya yang ada di Dinas Kominfo.
- b) Sumber Daya Manusia (SDM) TIK yang ada di Perangkat Daerah mulai dioptimalkan terlibat dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan TIK.
- c) Aplikasi-aplikasi umum mulai diterapkan di semua Perangkat Daerah.
- d) Dinas Kominfo mengeluarkan regulasi terkait dengan fungsi monitoring, pengawasan dan evaluasi implementasi TIK.
- e) Adanya peningkatan kepatuhan dari perangkat daerah terkait dengan penanggungjawab pelaksanaan SPBE di Provinsi NTT.
- f) Masuknya beberapa aplikasi khusus didalam kontrak kinerja antara Gubernur NTT dengan Para eselon II terkait dengan penggunaan aplikasi srikandi untuk tatanaskah dinas elektronik.

2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dilaksanakan untuk menilai sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 berdasarkan capaian yang diperoleh pada masing-masing indikator KIP.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Nomor:17/KEP/KIP/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 menorehkan hasil yang cukup memuaskan dengan diperolehnya nilai tingkat Keterbukaan Informasi Publik sebesar 77,06 dengan predikat "cukup informatif", naik 0,6 poin dari target yang diperjanjikan. Jika disandingkan dengan realisasi tahun 2022, nilai indeks mengalami kenaikan sebesar 0,07 poin atau peningkatan sebesar 0,09%. Maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh :

- a) Adanya dukungan Pimpinan dalam melaksanakan Monev SAQ (*Self Assessment Questionnaire*).
- b) Adanya forum komunikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- c) Adanya media komunikasi berupa WA Grup sebagai tempat *sharing* informasi, diskusi dan bertanya apabila ada kendala.
- d) PPID Utama yang menjalankan fungsi kontrol dan monitoring yang baik.
- e) Tim PPID Utama menjemput bola ke Perangkat Daerah untuk pengampilan data SAQ.
- f) Adanya kerjasama dengan NGO (Non Governmental Organization) yaitu USAID ERAT untuk mendukung kegiatan Keterbukaan Informasi Publik.
- g) Adanya keaktifan website PPID Utama, PPID pelaksana, website ntpprov dan media sosial masing-masing Perangkat Daerah dalam pemberitaan Program/Kegiatan untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik.

3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah

Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) instrumen yaitu: Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), *Cyber Security Maturity* (CSM), dan Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi (Eval Paminfo) menggunakan teknik wawancara berdasarkan hasil *self-assessment* melalui instrumen yang telah diisi dan melakukan observasi terhadap implementasi pelaksanaan pengamanan informasi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kapabilitas Pemerintah Daerah pada tahap tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi dan respons dalam menghadapi potensi ancaman keamanan data serta menguatkan implementasi keamanan SPBE di Indonesia. Serta sebagai upaya penentuan skala prioritas langkah dan penyiapan investasi dalam rangka menurunkan risiko keamanan siber pada Pemerintah Daerah.

Skor Indeks KAMI yang diperoleh tahun 2023 adalah 474 (Cukup Baik). Berdasarkan skor Indeks KAMI yang diperoleh, sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 8 dan 9 Tahun 2021, MAKA Diskominfo Provinsi NTT berhak mendapatkan sertifikat dan surat keterangan Indeks KAMI yang dikeluarkan oleh BSSN. Adapun kedua berkas tersebut telah teregistrasi, Surat Keterangan Indeks KAMI dengan nomor KET.1023/BSSN/D3/PS.02.02/07/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dan Sertifikat Indeks KAMI dengan nomor SERT.6869/BSSN/D3/PS.02.02/07/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil penilaian instrumen CSM didapatkan skor indeks kematangan sebesar 3,17 dan masuk ke dalam Level Kematangan Tingkat 3 yaitu menunjukkan bahwa dalam penerapan keamanan siber proses yang dilakukan sudah terorganisir dengan jelas, bersifat formal, dilakukan secara berulang, dilakukan revidi berkala, dan konsisten. Namun penerapan perubahan belum dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan keamanan siber pada level ini mulai dapat terukur dengan baik dan organisasi memiliki tingkat resiko siber yang tinggi.

Selanjutnya pada Evaluasi Persandian Tahun 2023 terdapat perubahan nama yang semula Evaluasi Pelaksanaan Persandian (Eval Laksan) berubah menjadi Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi (Eval Paminfo) dengan instrument evaluasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala BSSN Nomor 1 Tahun 2023. Berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan atas dokumen, data dukung dan konfirmasi diperoleh hasil bahwa status Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Pengamanan Informasi T.A. 2023 yaitu “cukup” pada skor 79,078. Jika disandingkan dengan realisasi tahun 2022, nilai indeks mengalami kenaikan sebesar 1,599 poin atau peningkatan sebesar 2,06%. Maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh :

- a) Sebagian besar aspek penyelenggaraan persandian yang meliputi kebijakan, pengembangan SDM, penguatan konfigurasi sistem elektronik, layanan keamanan dan pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, dapat dilaksanakan sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dukungan Pimpinan terhadap peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia), dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan SDM.
- c) Sudah ada peningkatan SDM.
- d) Pola hubungan komunikasi sandi melalui email sanapati yang menghubungkan Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kab/Kota sampai saat ini masih berjalan.
- e) Pada area tata kelola sudah dilakukan revidi Pergub SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi).
- f) Pada area pengamanan elektronik, unit Persandian sudah melakukan indentifikasi kerentanan dan penilaian resiko terhadap sistem elektronik lingkup Pemerintah Provinsi.

4. Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.

Untuk tercapainya indikator Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan 2 (dua) layanan yaitu :

- a) Layanan internet *dedicated* terhadap 34 Perangkat Daerah dan
- b) Layanan *video conference* Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Sekretaris Daerah, layanan terhadap 39 Perangkat Daerah dan NGO (Non-Governmental Organization) ataupun stakeholder lainnya.

Fasilitasi *video conference* yang disediakan bagi Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Sekretaris Daerah dan terhadap 39 Perangkat Daerah disediakan secara gratis, sedangkan fasilitasi *video conference* kepada NGO/stakeholder merupakan layanan yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Sepanjang Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan internet *dedicated* bagi 34 Perangkat Daerah dengan total perangkat terpasang sebanyak 304 GPON dan 88 Ruckus, juga fasilitasi *video conference* bagi Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris dan 39 Perangkat Daerah sebanyak 124 kali. Maka dapat disimpulkan target Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD, RENSTRA, RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%.

Hal ini disebabkan oleh :

Pengembangan infrastruktur jaringan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Pembangunan tersebut dalam bentuk Pemasangan Jaringan Fiber Optik beserta dengan kelengkapan pendukungnya di 34 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan UPTD Provinsi NTT yang berada di Kota Kupang. Sedangkan untuk layanan internet *video conference*, Dinas Komunikasi dan Informatika selalu menyiapkan dukungan internet, peralatan dan SDM yang akan menyediakan layanan *video conference*.

Layanan Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap seluruh Perangkat Daerah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel. 11

Layanan Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT

No.	Nama Perangkat Daerah	Jenis Cakupan Layanan Internet		Jumlah Aktivasi	
		Layanan Internet Dedicated	Layanan Internet Video Conference	GPON	RUCKUS
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	18	8
	▪ Sekolah Atlet SKO			1	
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	7	4
	▪ UPT Pembibitan Produksi Tanam			1	
	▪ Kantor PKH cabang Kab. Kupang			1	1
	▪ Kantor PKH cabang Kota Kupang			1	
	▪ UPT Pengolahan Limbah			1	
3	Dinas Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	8	3
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	3	2
	▪ UPT PPA			1	
	▪ UPT PA			1	
5	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	9	
	▪ UPT Latnakes			2	
	▪ UPT Lapkes			1	
	▪ UPT RSJ Naimata			1	
	▪ Free Wifi			1	1
6	RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	✓	✓	1	
7	Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	1	2
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	8	3
	▪ UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih			1	
	▪ UPT Proteksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan			2	
	▪ UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura			1	
	▪ UPT Perbenihan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan			1	
9	Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	6	3
	▪ UPT Pembibitan Ternak			1	
	▪ UPT Veteniner			1	

No.	Nama Perangkat Daerah	Jenis Cakupan Layanan Internet		Jumlah Aktivasi	
		Layanan Internet Dedicated	Layanan Internet Video Conference	GPON	RUCKUS
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	4	1
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	14	5
	▪ Free wifi			1	1
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	9	1
	▪ UPT LTSA P2TKI			1	
	▪ UPT PLUT			1	
13	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	4	1
	▪ UPT Perikanan Tenau			1	
	▪ UPT Perikanan Oeba			1	
	▪ Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan			1	
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	2	
15	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	9	1
	▪ UPT Terminal Oebobo				
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	5	3
	▪ UPT GTA			1	
	▪ Dekranasda			2	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	1	1
18	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	6	1
	▪ UPT Tuna Netra			1	
	▪ UPT Panti Jompo			1	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	8	4
	▪ Kantor PKK			2	
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	3	1
	▪ UPT GOR Oepoi			1	1
	▪ UPT Wisma Atlet			1	
21	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	5	5
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	6	1

No.	Nama Perangkat Daerah	Jenis Cakupan Layanan Internet		Jumlah Aktivasi	
		Layanan Internet Dedicated	Layanan Internet Video Conference	GPON	RUCKUS
	▪ Cabang Dinas ESDM Kota Kupang			1	
23	Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	10	4
	▪ Gedung Satu Data			4	1
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	5	2
	▪ Pusdalops			1	
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	22	2
26	Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓		
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	6	4
28	Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	3	1
29	Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	19	1
	▪ Ruang Kerja Karo			1	
	▪ Ruang Kerja Gubernur			1	1
	▪ Ruang TU Gubernur			1	1
	▪ Ruang Rapat Gubernur dan dan Wagub				1
	▪ Ruang Kerja Wagub				1
	▪ Ruang TU Wagub				1
	▪ Ruang Kerja Sekda			1	1
	▪ Ruang TU Sekda				1
	▪ Ruang Rapat Sekda			1	1
	▪ Ruang Asisten 1,2 , dan 3			3	
	▪ Ruang Rapat Asisten			1	1
	▪ Ruang Kerja Staf Khusus				1
	▪ Ruang Kerja Staf Ahli				1
	▪ Smart Digital Corner			1	
	▪ Perpustakaan Umum			1	
	▪ Aula El Tari			3	1
	▪ Rujab Gubernur			4	2
	▪ Gedung Sasando (Aula Fernandez)			2	1
	▪ Rujab Sekda			1	
30	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓		
31	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓		

No.	Nama Perangkat Daerah	Jenis Cakupan Layanan Internet		Jumlah Aktivasi	
		Layanan Internet Dedicated	Layanan Internet Video Conference	GPON	RUCKUS
32	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓		
33	Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	31	
34	Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	2	1
35	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	3	1
36	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		✓		
37	Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	1	1
38	Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	1	1
39	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	2	1
Total Perangkat				304	88

A.5. Permasalahan dan Solusi

A.5.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai Sasaran - Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. SDM TIK

Sampai saat ini kualitas dan kuantitas SDM masih menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian target kinerja utama di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Kuantitas dan kualitas SDM yang tidak memenuhi standar akan menghambat bahkan menjadi kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas yang telah diisyaratkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 – 2023.

Ketersediaan SDM yang belum memadai disebabkan minimnya pelatihan-pelatihan terkait teknologi informasi dan komunikasi. Padahal pengembangan SDM harusnya menjadi salah satu prioritas dalam birokrasi saat ini apalagi di era digitalisasi seperti sekarang dimana ASN dituntut beradaptasi dengan pola kerja yang baru dengan meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas serta memprioritaskan penggunaan teknologi.

SDM sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting memerlukan pemenuhan kebutuhan yang menjadi sumber motivasi dalam meningkatkan semangat kerja. Motivasi itu adalah dengan terpenuhinya gaji atau upah yang baik, pekerjaan yang aman, suasana kerja yang kondusif, penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan, pimpinan yang adil dan bijaksana serta insentif yang besarannya proporsional dan juga bersifat progresif. Sumber daya manusia seharusnya tidak dipandang sebagai objek yang harus digunakan secara produktif tanpa memperhitungkan kebutuhan dan keinginan mereka, dengan demikian kinerja ASN akan berada pada tingkat tertinggi (optimal) sesuai kemampuannya masing-masing.

2. Anggaran

Secara umum hambatan dan kendala pelaksanaan penggunaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti. Namun demikian, dengan adanya kebijakan anggaran yang menolak/menunda pengajuan Ganti Uang (GU) berakibat pada bergesernya jadwal pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang sudah ditentukan bahkan 82,39% belanja modal tidak dapat terealisasi.

Alokasi anggaran yang sangat minim dan inkonsistensi anggaran dalam pembiayaan program dan kegiatan mulai dari tahapan perencanaan sampai penganggaran mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan yang merupakan prioritas bagi pencapaian indikator tidak teralokasikan seperti penyediaan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai landasan utama didalam pengintegrasian berbagai layanan berbasis elektronik serta sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Namun demikian, seluruh alokasi dana yang ada selalu diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Adanya kebijakan prioritas alokasi anggaran menyebabkan pembayaran insentif/tunjangan sedikit terhambat/tertunda. Karena bagi mayoritas ASN uang masih merupakan motivasi utama dalam bekerja untuk mencapai kinerja yang lebih baik, maka sangat diharapkan peningkatan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan pemberian insentif akan mendorong ASN untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Insentif terkait erat dengan kinerja karyawan. Terdapat timbal balik dua arah antara pemberian insentif dengan kinerja. Insentif diberikan karena adanya kinerja yang baik dan diberikan untuk lebih meningkatkan kinerja lagi di masa mendatang.

3. Dukungan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT merupakan indikator Pemerintah Provinsi sehingga untuk pencapaiannya dibutuhkan dukungan dari 38 Perangkat Daerah lainnya. Regulasi sudah mengatur urusan wajib Kominfo yang dikongkurenskan dan diberikan kepada pemerintahan daerah yaitu e-Government atau SPBE dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta peran kominfo sebagai walidata di daerah. Namun dalam pelaksanaannya masing-masing Perangkat Daerah masih mengembangkan aplikasi secara parsial dan tidak terintegrasi, belum memenuhi standarisasi TIK serta adanya keengganan dari Perangkat Daerah sebagai produsen data dalam mengirimkan data bahkan keengganan Perangkat Daerah dalam menaati regulasi yang telah dibuat.

A.5.2 Solusi

Terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan internal maupun eksternal, maka solusinya adalah sebagai berikut :

1. Memberi kesempatan kepada setiap ASN untuk menyalurkan ide dan gagasan, memberi penghargaan serta meningkatkan SDM melalui pembinaan, pelatihan dan pendidikan (secara offline dan online);
2. Memprioritaskan alokasi anggaran yang ada untuk pencapaian indikator utama dan menjalin kerjasama dengan NGO (Non Governmental Organization) dalam hal mendapatkan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan serta membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal mendapatkan dukungan berupa sinkronisasi Program/Kegiatan, dukungan data dan informasi maupun kerjasama sebagai narasumber atau tenaga ahli;
3. Untuk meningkatkan dan mendorong kesadaran Perangkat Daerah maka sudah diupayakan dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Perangkat Daerah, menyediakan wadah komunikasi bersama melalui grup-grup komunikasi serta mengeluarkan surat edaran/penegasan dari Sekretaris Daerah.

A.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD (Rp.)	P-APBD (Rp)		
	TOTAL	14.545.364.115	13.590.100.235	82 Pegawai	
1.Realisasi Penyerapan Anggaran Minimal 85%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.290.399.195,-	7.335.135.315,-	1. Sekretaris : 1 Orang	1. SmartTV : 1 Unit
2.Belanja menggunakan Aplikasi e-Purchasing minimal 40 % dari pagu belanja barang dan jasa	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.140.000,-	62.140.000,-	2. Perencana Ahli Muda : 1 Orang	2. Komputer PC : 14 Unit
3.Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 04 Februari 2023	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.800.000,-	30.800.000,-	3. Kasubag Kepum : 1 Orang	3. Laptop : 8 Unit
4.Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.340.000,-	31.340.000,-	4. Kasubag Keuangan : 1 Orang	4. Printer : 10 Unit
5.Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.112.061.280,-	6.104.958.000,-	5. Pranata Kearsipan : 1 Orang	5. LCD : 2 Unit
6.Persentase Tindak	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.057.441.280,-	6.050.338.000,-	6. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris : 1 Orang	6. Harddisk Eksternal : 2 Unit
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.620.000,-	54.620.000,-	7. Pustakawan Ahli Muda : 1 Orang	7. Layar Monitor : 1 Unit
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.733.000,-	8.733.000,-	8. Pengadministrasi Keuangan: 1 Orang	8. CPU : 1 Unit
				9. Bendahara : 1 Orang	9. Infocus+Layar : 2 Unit
				10. Bendahara Penerimaan : 1 Orang	10. Spiker Aktiv : 4 Unit
				11. Pranata Humas Ahli Pertama : 1 Orang	11. Mixer : 1 Unit
				12. Analis Kebijakan Ahli Muda : 1 Orang	12. Wireless Mike : 2 Unit
				13. Penyusun Lap. Keuangan : 1 Orang	13. Mike duduk : 6 Unit
				14. Analis Data dan Informasi : 1 Orang	14. UPS : 4 Unit
				15. Pengadministrasi Umum : 4 Orang	15. Scanner : 1 Unit
					16. Kamera : 1 Unit
					17. Tripot : 1 Unit
					18. Kamera Drone : 1 Unit
					19. Handycam : 1 Unit
					20. Resiver CCTV : 1 Unit

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD (Rp.)	P-APBD (Rp)		
Lanjut Temuan BPK dan APIP, Administrasi 100%, Keuangan 80% 7. Jumlah Inovasi minimal 2 (dua) jenis 8. Pengelolaan tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik 10. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif 11. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/ Pihak lain	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.733.000,-	8.733.000,-	16. Analis Publikasi : 1 Orang 17. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana : 2 Orang 18. Pengadministrasi Kepegawaian : 1 Orang 19. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang 20. Pramu Kebersihan : 2 Orang 21. Pengemudi : 1 Orang 22. Tenaga Administrasi : 4 Orang 23. Tenaga Supir : 1 Orang 24. Tenaga Kebersihan : 2 Orang 25. Tenaga Security : 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.235.500,-	7.235.500,-		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,-	35.640.800,-		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	39.993.300,-	39.993.300,-		
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.984.000,-	15.984.000,-		
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,-	75.000.000,-		
	Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.629.200,-	10.997.200,-		
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.101.650,-	26.101.650,-		
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.101.650,-	26.101.650,-		

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD (Rp.)	P-APBD (Rp)		
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.034.865,-	733.374.465,-		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200,-	4.993.200,-		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.998.785,-	149.998.785,-		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.042.880,-	578.382.480,-		
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.486.400,-	214.977.400,-		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	99.996.400,-	99.987.400,-		
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.740.000,-	57.260.000,-		
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.750.000,-	57.730.000,-		

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD (Rp.)	P-APBD (Rp)		
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.118.734.200,-	1.118.734.200,-	1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Kasie Penge. Data dan Statistik Sektoral : 1 Orang 3. Pranata Humas Ahli Muda : 2 Orang 4. Analis Konten Media Sosial : 1 Orang 5. Analis Publikasi : 2 Orang 6. Pranata Humas Ahli Pertama: 1 Orang 7. Analis Data Standarisasi : 1 Orang 8. Tenaga Administrasi : 5 Orang 9. Tenaga Supir : 1 Orang	<u>Bidang PIKP :</u> 1. PC/Komputer : 9 Unit 2. Printer : 4 Unit 3. Laptop : 5 Unit 4. Kamera Shooting : 1 Unit 5. Monopod : 1 Unit 6. Kamera foto : 1 Unit 7. Flash Kamera : 1 Unit 8. Lensa Tele : 1 Unit 9. Memori Card 16 : 1 Unit 10. Baterai Cadangan camcorder : 1 Unit 11. UPS : 3 Unit 12. CPU : 1 Unit 13. Televisi : 2 Unit
	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.118.734.200,-	1.118.734.200,-		
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.118.734.200,-	1.118.734.200,-		
▪ Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT ▪ Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet Terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.100.090.720,-	5.100.090.720,-	<u>Bidang Layanan e-Government:</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Komputer Ahli Muda : 2 Orang 3. Pranata Humas Ahli Muda : 1 Orang 4. Analis Penerapan Aplikasi dan Konten : 1 Orang 5. Pengadministrasi Umum : 1 Orang 6. Pengelola Database : 1 Orang 7. Pranata Komputer : 1 Orang 8. Pranata Humas Ahli Pertama : 1 Orang 9. Tenaga Administrasi : 2 Orang	<u>Bidang Layanan e-Government:</u> 1. Komputer/PC : 10 Unit 2. Printer : 2 Unit 3. UPS : 14 Unit 4. Printer : 1 Unit 5. Laptop : 2 Unit 6. Televisi : 1 Unit 7. Server : 3 Unit 8. HDD : 2 Unit 9. Stabilizer : 3 Unit 10. RAM Server : 2 Unit
	Kegiatan: Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.100.090.720,-	5.100.090.720,-		
	Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5.100.090.720,-	5.100.090.720,-		

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD (Rp.)	P-APBD (Rp)		
				<u>Bidang Pelayanan Infrastruktur :</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Komputer Ahli Muda : 1 Orang 3. Pengendali Teknologi Informasi : 1 Orang 4. Pengendali Jarg. Komunikasi : 1 Orang 5. Penyusun Standar Teknologi Informasi : 1 Orang 6. Pranata Humas Ahli Muda : 1 Orang 7. Pengadministrasi Umum : 2 Orang 8. Pengawas Teknologi Informasi : 1 Orang 9. Tenaga Administrasi : 2 Orang	<u>Bidang Pelayanan Infrastruktur:</u> 1. Laptop : 4 Unit 2. Printer : 1 Unit 3. PC/Komputer : 2 Unit 4. Layar Monitor : 1 Unit
Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	36.140.000,-	36.140.000,-	1. Manggala Informatika : 2 Orang 2. Analis Persandian : 2 Orang 3. Pranata Komputer Ahli Pertama : 1 Orang	1. Laptop : 1 Unit 2. PC/Komputer : 3 Unit 3. UPS : 1 Unit 4. Printer : 2 Unit 5. HDD : 1 Unit 6. CPU : 1 Unit
	Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	36.140.000,-	36.140.000,-	4. Pengadministrasi Umum : 7 Orang 5. Pranata Komputer : 1 Orang 6. Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi : 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	36.140.000,-	36.140.000,-		

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai RPJMD, RENSTRA, RKT, dan PK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Tabel. 13
Analisis Program/Kegiatan dan Alokasi Anggaran yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
			APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
			13.590.100.235	13.590.100.235			
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Realisasi Penyerapan Anggaran Minimal 85%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.290.399.195,-	7.335.135.315,-	1. Nilai pelaksanaan SAKIP 2. Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	1. BB Kategori 2. 100 %	Sekretariat
	2. Belanja menggunakan Aplikasi e-Purchasing minimal 40 % dari pagu belanja barang dan jasa						
	3. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 04 Februari 2023	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.140.000,-	62.140.000,-	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	20 Dokumen	
	4. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.800.000,-	30.800.000,-	1. Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD	1 Laporan	
	5. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
			APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
	6. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP, Administrasi 100%, Keuangan 80%				2. Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD	17 Laporan	
	7. Jumlah Inovasi minimal 2 (dua) jenis				3. Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD	1 Laporan	
	8. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan melalui aplikasi Srikandi paling lambat Januari 2023				4. Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%	
	9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik				5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	1 Laporan	
	10. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.340.000,-	31.340.000,-	1. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	100%	
	11. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/ Pihak lain				2. Jumlah Laporan Evaluasi Berkala terhadap Kinerja ASN	16 Laporan	
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.112.061.280,-	6.104.958.000,-	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	67 ASN x 12 Bulan	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.057.441.280,-	6.050.338.000,-	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	67 ASN x 12 Bulan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
			APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.620.000,-	54.620.000,-	1. Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun	17 Laporan	
					2. Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa	12 Laporan	
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.733.000,-	8.733.000,-	Jumlah ASN yang berkinerja	87 ASN	
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.733.000,-	8.733.000,-	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi	87 ASN	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.850.800,-	184.850.800,-	Persentase layanan umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.235.500,-	7.235.500,-	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,-	35.640.800,-	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
			APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material	39.993.300,-	39.993.300,-	Jumlah paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor yang disediakan	12 Paket	
		Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	15.984.000,-	15.984.000,-	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,-	75.000.000,-	1. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	
					2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Rakor Bidang TIK	1 Dokumen	
		Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.629.200,-	10.997.200,-	Jumlah Laporan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.101.650,-	26.101.650,-	Persentase layanan pengadaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	100%	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.101.650,-	26.101.650,-	1. Jumlah dukungan layanan virtual meeting yang disediakan	1 Akun Zoom	
					2. Jumlah peralatan komputer yang disediakan	1 Unit	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
			APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.374.465,-	733.374.465,-	Jumlah paket penyediaan jasa surat-menyurat, air, listrik, serta sewa hosting ntt.prov	12 Paket	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200,-	4.993.200,-	Jumlah paket penyediaan jasa surat-menyurat	12 Paket	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.998.785,-	149.998.785,-	1. Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia	12 Paket	
					2. Sewa hosting ntt.prov	1 Tahun	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.042.800,-	578.382.480,-	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Supir	19 PTT x 12 Bulan	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.486.400,-	214.977.400,-	Persentase pemeliharaan Barang Milik daerah yang berkualitas	100%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.987.400,-	99.987.400,-	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara, kebutuhan bahan bakar terpenuhi dan taat membayar pajak	6 Unit x 12 Bulan	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.740.00,-	57.260.000,-	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	60 Unit x 12 Bulan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
			APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.750.000,-	57.730.000,-	Jumlah Gedung Kantor dan Taman Kantor yang terpelihara	2 Paket x 12 Bulan	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik - 77 Skor	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.118.734.200,-	1.118.734.200,-	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	77 Skor	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.118.734.200,-	1.118.734.200,-	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	77 Skor	
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.118.734.200,-	1.118.734.200,-	1. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	77 Skor	
					2. Jumlah peserta Kegiatan Koordinasi PPID Utama dan Pembantu	40 Orang x 1 Kegiatan	
					3. Jumlah peserta Kegiatan Forum Komunikasi PPID	40 Orang x 1 Kegiatan	
					4. Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi KIM dan Desa Digital	50 Orang x 1 Kabupaten	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
			APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
					5. Kegiatan Rekrutmen Komisi Informasi	KI Terpilih	
					6. Dana Operasional KPID dan KI yang tersedia	2 Lembaga x 12 Bulan	
					7. Jumlah peserta Kegiatan Bimtek/Workshop penyelenggaraan Statistik Sektoral	40 Orang x 1 Kegiatan	
					8. Persentase data sektoral pada Aplikasi Loppo daeri eNTT	100%	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT - 2,7 Indeks 2. Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet teritegrasi - 100%	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.100.090.720,-	5.100.090.720,-	1. Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT 2. Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet teritegrasi	1. 2,7 Indeks 2. 100 %	1. Bidang Layanan E-Government 2. Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
			APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
		Kegiatan : Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.100.090.720,-	5.100.090.720,-	1. Indeks Evaluasi SPBE 2. Jumlah Website yang dikembangkan dan dikelola 3. Jumlah Bandwith Layanan Internet Dedicated 4. Jumlah PD yang terlayani Virtual Meeting	1. 2,7 Indeks 2. 2 Website 3. 1.000 Mbps x 12 Bulan 4. 39 PD x 12 Bulan	
		Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5.100.090.720,-	5.100.090.720,-	1. Indeks Evaluasi SPBE	2,7 Indeks	
					2. Jumlah peserta Interview Evaluasi SPBE	64 Orang x 1 Kegiatan	
					3. Jumlah Website yang terintegrasi	2 Website	
					4. Persentase Pemeliharaan Aplikasi e-Absen	100%	
					5. Jumlah PD yang mendapat Layanan Virtual Meeting	39 PD x 12 Bulan	
					6. Jumlah Bandwith Layanan Internet Dedicated	1.000 Mbps x 12 Bulan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
			APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah - 79,078 Skor	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	36.140.000,-	36.140.000 ,-	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	79,078 Skor	Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi
		Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	36.140.000,-	36.140.000,-	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	79,078 Skor	
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	36.140.000,-	36.140.000,-	1. Hasil Audit eksternal IKAMI, CSM dan Pelaksanaan Persandian	79,078 Skor	
					2. Jumlah Laporan Pengelolaan Webmail/Email Sanapati	12 Laporan	
					3. Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Sertifikasi Elektronik	12 Laporan	

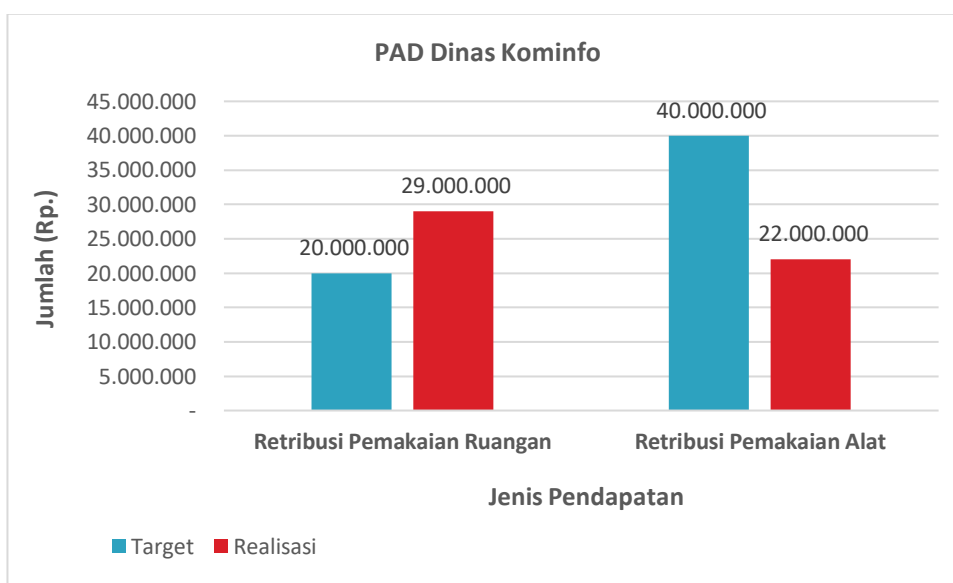
B. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan / Dana sebagai salah satu sub dalam kelompok kinerja sasaran, yakni: Indikator Kinerja Input, digunakan untuk membiayai kegiatan baik pendapatan, maupun belanja. dalam rangka Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023. Keseluruhan Anggaran / Dana berasal dari APBD Provinsi NTT, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2023, yang dapat dilaporkan alokasi dan realisasinya sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Tabel. 14
Tabel Realisasi Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,-	51.000.000,-	85,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,-	51.000.000,-	85,00
	- Retribusi Pemakaian Ruang	20.000.000	29.000.000	145,00
	- Retribusi Pemakaian Alat	40.000.000	22.000.000	55,00



Gambar. 10
Target dan Realisasi Jenis PAD Dinas Kominfo

Obyek retribusi yang menjadi andalan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah pemanfaatan ruangan aula pertemuan dan pemakaian peralatan TIK. Layanan Pemakaian Aula oleh Dinas Kominfo dilakukan berdasarkan surat permohonan yang diterima,

sedangkan untuk pemakaian Peralatan TIK dilayani pada Ruang Kerja Gubernur, Ruang Rapat Gubernur, Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah (berdasarkan permohonan yang diajukan) dan Masyarakat Umum (berdasarkan permohonan yang diajukan).

Pemakaian peralatan TIK pada Ruang Kerja Gubernur, Ruang Rapat Gubernur, Ruang Rapat Sekretaris Daerah intensitas penggunaannya tinggi namun tidak ditarik/dikenakan biaya, dengan semakin padatnya Kegiatan Rapat *Virtual* Bapak Pj. Gubernur dan Bapak Sekretaris Daerah serta semakin banyaknya permohonan penggunaan peralatan TIK, namun karena jumlah peralatan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika yang sangat terbatas mengakibatkan banyak permohonan penggunaan peralatan TIK yang tidak terlayani.

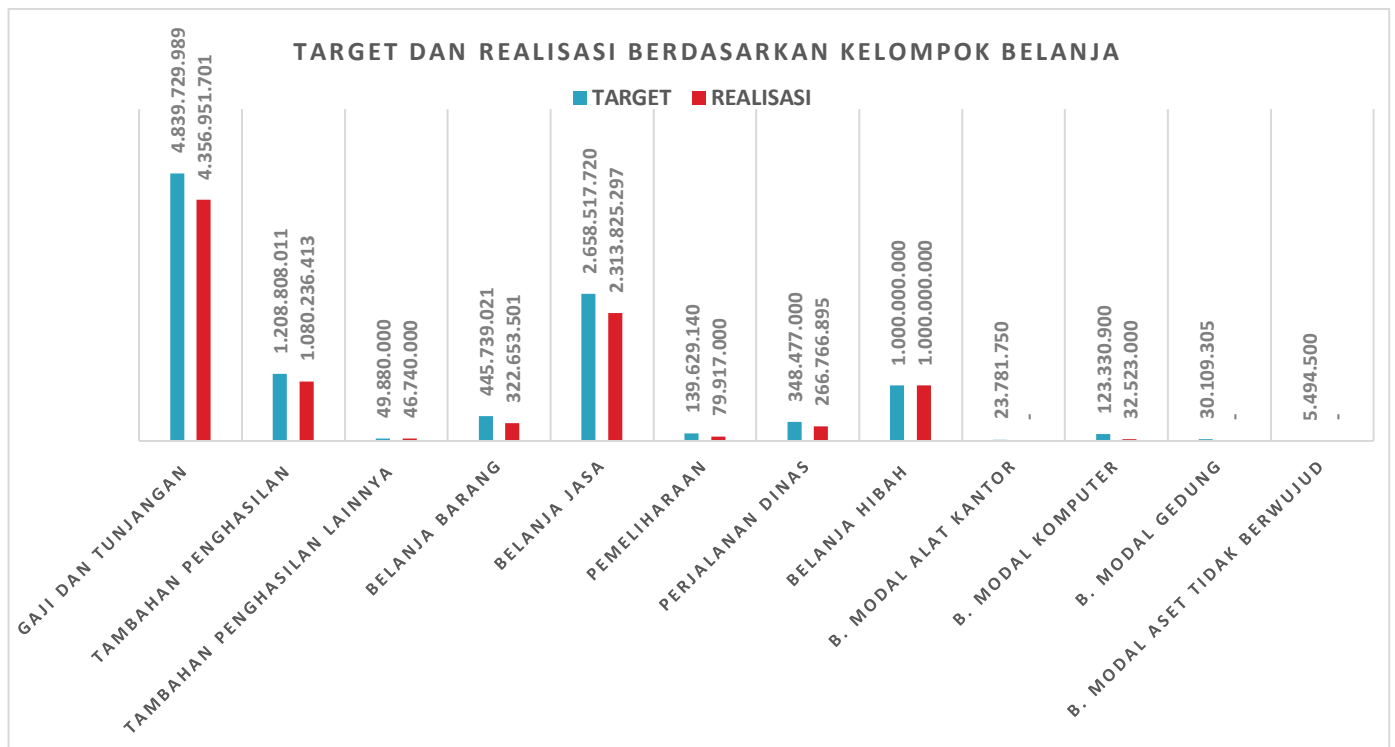
II. BELANJA

Tabel. 15

Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja

Realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja sebagai berikut :

NO	KELOMPOK BELANJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	13.405.383.780,-	12.629.786.049,-	775.597.731,-	94,21
	1.1 Belanja Pegawai	6.098.418.000,-	5.483.928.114,-	614.489.886,-	89,92
	- Belanja Gaji dan Tunjangan	4.839.729.989,-	4.356.951.701,-	428.778.288,-	90,02
	- Belanja Tambahan Penghasilan	1.208.808.011,-	1.080.236.413,-	128.571.598,-	89,36
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	49.880.000,-	46.740.000,-	3.140.000,-	93,70
	1.2 Belanja Barang dan Jasa	6.306.965.780,-	6.145.857.935,-	161.107.845,-	97,45
	- Belanja Barang	445.739.021	322.653.501	123.085.520	72,39
	- Belanja Jasa	2.658.517.720	2.313.825.297	344.692.423	87,03
	- Belanja Pemeliharaan	139.629.140	79.917.000	59.712.140	57,24
	- Belanja Perjalanan Dinas	348.477.000	266.766.895	81.710.105	76,55
	1.3 Belanja Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100
	- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100
2	Belanja Modal	184.716.455,-	32.523.000,-	152.193.455,-	17,61
	2.1 Peralatan dan Mesin	149.112.650,-	32.523.000,-	116.589.650,-	21,81
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.781.750,-	0	23.781.750,-	0
	- Belanja Modal Komputer	123.330.900,-	32.523.000,-	92.807.900,-	25,95
	2.2 Gedung dan Bangunan	30.109.305,-	0	30.109.305,-	0
	- Belanja Modal Bangunan Gedung	30.109.305,-	0	30.109.305,-	0
	2.2 Modal Aset Tetap Lainnya	5.494.500,-	0	5.494.500,-	0
	- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.494.500,-	0	5.494.500,-	0
	- BELANJA DAERAH	13.590.100.235,-	12.662.309.049,-	927.791.186,-	93,17



Gambar. 11
Target dan Realisasi Jenis Belanja Dinas Kominfo

Dari gambaran diatas, dapat tergambar realisasi penyerapan anggaran mencapai 93,17%, realisasi belanja operasi sebesar 94,21% dan realisasi belanja modal sebesar 17,61%. Tidak direalisasikan 7,59% belanja operasi dan 82,39% belanja modal karena adanya kebijakan anggaran yang diprioritaskan untuk Belanja Listrik, Air, Telp, dan Internet serta adanya kebijakan anggaran yang menolak/menunda pengajuan Ganti Uang (GU).

Tabel. 16

Tabel Realisasi Belanja Program/Kegiatan

Terhadap belanja Program dan Kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI						
		KEUANGAN			FISIK			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		13.590.100.235	12.662.309.049	93,17				100
1. Realisasi Penyerapan Anggaran Minimal 85% 2. Belanja menggunakan Aplikasi e-Purchasing minimal 40 % dari pagu belanja barang dan jasa 3. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, LKIP paling lambat tanggal 04 Februari 2023 4. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB 5. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90% 6. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP, Administrasi 100%, Keuangan 80% 7. Jumlah Inovasi minimal 2 (dua) jenis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.335.135.315	6.553.597.199	89,35	1. Nilai pelaksanaan SAKIP 2. Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	1. BB Kategori 3. 100 %	1. BB Kategori 2. 100 %	1. 100 2. 100
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.140.000	45.342.000	72,97	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	20 Dokumen	20 Dokumen	100
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.800.000	30.792.000	99,97	1. Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPD) SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
					2. Jumlah Laporan Kinerja Berkala SKPD	17 Laporan	17 Laporan	100

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI						
		KEUANGAN			FISIK			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
8. Pengelolaan tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik 10. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik menuju Informatif 11. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain					3. Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
					4. Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100
					5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.340.000	14.550.000	46,43	1. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	100%	100%	100
					2. Jumlah Laporan Evaluasi Berkala terhadap Kinerja ASN	16 Laporan	16 Laporan	100
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.104.958.000	5.490.465.114	89,93	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	67 ASN x 12 Bulan	67 ASN x 12 Bulan	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.050.338.000	5.438.568.114	89,89	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	67 ASN x 12 Bulan	63 ASN x 12 Bulan	100

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI						
		KEUANGAN			FISIK			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.620.000	51.897.000	95,01	1. Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun	17 Laporan	17 Laporan	100
					2. Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa	12 Laporan	12 Laporan	100
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.733.000	975.000	11,16	Jumlah ASN yang berkinerja	87 ASN	87 ASN	100
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.733.000	975.000	11,16	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi	87 ASN	87 ASN	100
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.850.800	145.650.425	78,79	Persentase layanan umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%	100 %	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.235.500	6.759.000	93,41	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.640.800	21.472.200	60,25	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI						
		KEUANGAN			FISIK			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material	39.993.300	31.061.200	77,67	Jumlah paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	15.984.000	9.499.300	59,43	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	100
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	69.246.280	92,33	1. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	100
					2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Rakor Bidang TIK	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.997.200	7.612.445	69,22	Jumlah Laporan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	1 Laporan	100
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.101.650	26.046.150	99,79	Persentase layanan pengadaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	100%	100 %	100
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.101.650	26.046.150	99,79	1. Jumlah dukungan layanan virtual meeting yang disediakan	100%	100 %	100

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI						
		KEUANGAN			FISIK			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
					2. Jumlah peralatan komputer yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.374.465	722.045.955	98,46	Jumlah paket penyediaan jasa surat-menyurat, air, listrik, serta sewa hosting ntt.prov	12 Paket	12 Paket	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200	2.700.000	54,07	Jumlah paket penyediaan jasa surat-menyurat	12 Paket	12 Paket	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.998.785	144.103.076	96,07	1. Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia	12 Paket	12 Paket	100
					2. Sewa hosting ntt.prov	1 Tahun	1 Tahun	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	578.382.480	575.242.879	99,46	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Supir	19 PTT x 12 Bulan	19 PTT x 12 Bulan	100
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.977.400	123.072.555	57,25	Persentase pemeliharaan Barang Milik daerah yang berkualitas	100%	100 %	100

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI						
		KEUANGAN			FISIK			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.987.400	89.670.955	89,68	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara, kebutuhan bahan bakar terpenuhi dan taat membayar pajak	5 Unit x 12 Bulan	5 Unit x 12 Bulan	100
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.260.000	17.158.000	29,97	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	60 Unit x 12 Bulan	18 Unit x 12 Bulan	100
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.730.000	16.243.600	28,14	Jumlah Gedung Kantor dan Taman Kantor yang terpelihara	2 Paket x 12 Bulan	2 Paket x 12 Bulan	100
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik - 77 Skor	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.118.734.200	1.112.588.200	99,45	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	77 Skor	77,06 Skor	100
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.118.734.200	1.112.588.200	99,45	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	77 Skor	77,06 Skor	100

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI						
		KEUANGAN			FISIK			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.118.734.200	1.112.588.200	99,45	1. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	77 Skor	77,06 Skor	100
					2. Jumlah Laporan Pengelolaan Website PPID Utama	12 Laporan	12 Laporan	100
					3. Jumlah peserta Kegiatan Koordinasi PPID Utama dan Pembantu	40 Orang x 1 Kegiatan	40 Orang x 1 Kegiatan	100
					4. Jumlah peserta Kegiatan Forum Komunikasi PPID	40 Orang x 1 Kegiatan	40 Orang x 1 Kegiatan	100
					5. Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi KIM dan Desa Digital	50 Orang x 1 Kabupaten	50 Orang x 1 Kabupaten	100
					6. Kegiatan Rekrutmen Komisi Informasi	KI Terpilih	KI Terpilih	100
					7. Dana Operasional KPID dan KI yang tersedia	2 Lembaga x 12 Bulan	2 Lembaga x 12 Bulan	100

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI						
		KEUANGAN			FISIK			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
					8. Jumlah peserta Kegiatan Bimtek/Workshop penyelenggaraan Statistik Sektoral	40 Orang x 1 Kegiatan	40 Orang x 1 Kegiatan	100
					9. Persentase data sektoral pada Aplikasi Loppo daeri eNTT	100%	48,72 %	48,72
1. Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT - 2,7 Indeks 2. Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi 100%	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.100.090.720	4.961.693.650	97,29	1. Indeks Penyelenggaraan (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT 2. Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi	1. 2,7 Indeks 2. 100 %	1. 3,83 Indeks 2. 100 %	1. 100 2. 100
	Kegiatan : Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.100.090.720	4.961.693.650	97,29	1. Indeks Evaluasi SPBE 2. Jumlah Website yang dikembangkan dan dikelola 3. Jumlah Bandwith Layanan Internet Dedicated 4. Jumlah PD yang terlayani Virtual Meeting	1. 2,7 Indeks 2. 2 Website 3. 1.000 Mbps x 12 Bulan 4. 39 PD x 12 Bulan	1. 3,83 Indeks 2. 2 Website 3. 1.000 Mbps x 12 Bulan 4. 39 PD x 12 Bulan	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI						
		KEUANGAN			FISIK			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan :	5.100.090.720	4.961.693.650	97,29	1. Indeks Evaluasi SPBE	2,7 Indeks	3,83 Indeks	100
	Pengembangan dan				2. Jumlah peserta	64 Orang x 1	64 Orang x 1	100
	Pengelolaan Sumber Daya				Interview Evaluasi	Kegiatan	Kegiatan	
	Teknologi Informasi dan				SPBE			
	Komunikasi Pemerintah				3. Jumlah Website	2 Website	2 Website	100
	Daerah				yang terintegrasi			
					4. Persentase	100%	100 %	100
					Pemeliharaan Aplikasi			
					e-Absen			
					5. Jumlah PD yang	39 PD x 12	39 PD x 12	100
					mendapat Layanan	Bulan	Bulan	
					Virtual Meeting			
					6. Jumlah Bandwith	1.000 Mbps x	1.000 Mbps x	100
					Layanan Internet	12 Bulan	12 Bulan	
					Dedicated			
Tingkat Pengamanan Informasi Daerah - 79,078 Skor	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	36.140.000	34.430.000	95,27	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	79,078 Skor	79,078 Skor	100
	Kegiatan :	36.140.000	34.430.000	95,27	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	79,078 Skor	79,078 Skor	100
	Penyelenggaraan							
	Persandian untuk							
	Pengamanan Informasi							
	Pemerintah Daerah							
	Provinsi							

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI						
		KEUANGAN			FISIK			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	36.140.000	34.430.000	95,27	1. Hasil Audit eksternal IKAMI, CSM dan Pelaksanaan Persandian	79,078 Skor	79,078 Skor	100
					2. Jumlah Laporan Pengelolaan Webmail/Email Sanapati	12 Laporan	12 Laporan	100
					3. Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Sertifikasi Elektronik	12 Laporan	12Laporan	100

Dana yang digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal sesungguhnya sudah lebih fokus untuk dapat menyajikan seberapa besar tingkat capaian sasaran yang didasarkan pada tolok ukur kinerja. Dengan perkataan lain aspek keuangan yang disajikan dalam Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan gambaran sebagai data keuangan yang dikelola sesuai rencana / alokasi dana / anggaran pada program kegiatan serta realisasi pelaksanaan sesuai realisasi program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertolak dari uraian - uraian pada bab - bab terdahulu, maka ada beberapa hal yang dibuat sebagai kesimpulan dari keseluruhan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Provinsi NTT ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian, telah sesuai dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program kerja seperti yang tercantum dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, RENSTRA Perubahan Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
2. Kegiatan dapat berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi;
3. Terbatasnya alokasi dana/anggaran tidak menyurutkan semangat Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi target yang telah diperjanjikan;
4. Dari Pengukuran/Penilaian yang dilakukan terhadap Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU), tingkat capaian mencapai 100% yang menunjukkan keberhasilan yang sangat memuaskan dan diharapkan akan semakin baik lagi di Tahun 2024.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka diajukan beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Dana

Perlunya dukungan dana dalam membiayai Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo.

2. SDM

Untuk meningkatkan kualitas SDM antara lain melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier. Peningkatan kualitas SDM dapat memanfaatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal juga peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM yang secara aktif mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government. Hal ini hanya bisa terwujud jika ada dukungan dana yang memadai.

3. Komitmen pimpinan perangkat daerah

Untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi maka kesadaran setiap pimpinan Perangkat Daerah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan maupun pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, SDM, biaya, termasuk regulasi.

4. Pelaksanaan berbagai regulasi yang telah ditetapkan

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal, salah satunya karena masalah regulasi. Karena regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan ataupun mengontrol suatu kelompok maupun lembaga demi mencapai tujuan tertentu maka perlu adanya kesadaran untuk menaati setiap regulasi yang telah dibuat dan pemberian sanksi apabila ada Perangkat Daerah yang tidak menjalankan regulasi yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan sebagai bahan pertimbangan Kebijakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo	
Perencana Ahli Muda	
Analisis Data dan Informasi	

3. Komitmen pimpinan perangkat daerah

Untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi maka kesadaran setiap pimpinan Perangkat Daerah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan maupun pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, SDM, biaya, termasuk regulasi.

4. Pelaksanaan berbagai regulasi yang telah ditetapkan




Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal, salah satunya karena masalah regulasi. Karena regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan ataupun mengontrol suatu kelompok maupun lembaga demi mencapai tujuan tertentu maka perlu adanya kesadaran untuk menaati setiap regulasi yang telah dibuat dan pemberian sanksi apabila ada Perangkat Daerah yang tidak menjalankan regulasi yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan sebagai bahan pertimbangan Kebijakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo	
Perencana Ahli Muda	
Analisis Data dan Informasi	



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frederik C.P Koenunu, ST, M.H**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 7 Desember 2023

Pihak Kedua,

Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Pertama,

Frederik C.P Koenunu, ST, M.H

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI		TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023		
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	3,35 Index point	2,7 Index point		<p>Nilai indeks SPBE yang direncanakan pada tahun berjalan $\times 100$</p> <p>Nilai indeks SPBE hasil evaluasi Kementerian RB pada tahun berjalan</p>
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	76,99 Skor	77 Skor		<p>Nilai tingkat keterbukaan informasi publik yang direncanakan pada tahun berjalan $\times 100$</p> <p>Nilai keterbukaan informasi publik hasil evaluasi KI Pusat pada tahun berjalan</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI		TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023		
1	2	3	4	5	6	
		Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	77,479 Skor	79,078 skor		$\frac{\text{Nilai Tingkat Pengamanan Informasi daerah yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai Tingkat Pengamanan Informasi daerah hasil evaluasi BSSN pada tahun berjalan}} \times 100$
		Percentage Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi	100 %	100 %		$\frac{\text{Percentage layanan distribusi Intranet terintegrasi di PD yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Percentage layanan distribusi Intranet terintegrasi di PD yang terrealisasi pada tahun berjalan}} \times 100$

B. Pelaksanaan Anggaran

	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (program)	Rp. 13,590.100.235	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.335.135.315	Realisasi minimal 90%
	2. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.118.734.200,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 5.100.090.720,-	Realisasi minimal 85%
	4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 36.140.000,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 60.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD)	Rp. 13.650.100.235	Realisasi minimal 90%
2)	APBN		

Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)		
1. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	-
2. Bina Administrasi Kewilayahan	Rp.	-
Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp.	-

C. Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Penyampaian IKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);

F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;

G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut:

1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) jenis;

I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;

J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);

L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 7 Desember 2023

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Ayodhia G. L. Kalake

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik P. Koennu, ST, M.H

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	